Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 31815-31821

Politik Perkotaan: Studi Tentang Alih Fungsi Trotoar di Kota Palembang

Farah Anisya Ramadhani[1],Ryllian Chandra Eka Viana[2], Dumyati[3]

[1,2,3]Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah Palembang

Email: farahr0611@gmail.com, ryllianchandra_uin@radenfatah.ac.id, dumyati_uin@radenfatah.ac.id

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Alih fungsi trotoar menjadi salah satu permasalahan ruang publik yang masih banyak ditemukan di Kota Palembang, khususnya pada ruas Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Trotoar yang seharusnya digunakan sebagai fasilitas bagi pejalan kaki sering dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti parkir kendaraan, aktivitas perdagangan, penempatan barang dagangan, hingga kepentingan usaha pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik perkotaan dalam pengelolaan trotoar yang mengalami alih fungsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi trotoar di Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori politik perkotaan Robert A. Dahl yang memandang kota sebagai arena interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda dalam pemanfaatan ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi trotoar terjadi karena adanya interaksi kepentingan antara pemerintah, pedagang kaki lima, pemilik usaha, dan masyarakat. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama munculnya aktivitas non-pedestrian di atas trotoar. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan serta rendahnya kesadaran masyarakat turut memperparah kondisi tersebut. Upaya pemerintah melalui penertiban dan pengawasan telah dilakukan, namun belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih konsisten, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kebijakan yang lebih berpihak pada hak pejalan kaki sebagai pengguna utama trotoar.

Kata Kunci: Politik Perkotaan, Alih Fungsi Trotoar, Ruang Publik, Pejalan Kaki.

ABSTRACT

The conversion of sidewalks has become a public space issue that is still commonly found in Palembang City, particularly along Jenderal Sudirman Street and Jenderal Ahmad Yani Street. Sidewalks that should function as pedestrian facilities are frequently used for vehicle parking, street vending, commercial activities, and private business purposes. This study aims to analyze the role of urban politics in managing converted sidewalks and to identify the factors causing sidewalk conversion in Palembang City. This research employed a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The study used Robert A. Dahl's urban politics theory, which views the city as an arena where various actors compete and negotiate over public space utilization. The findings indicate that sidewalk conversion occurs due to interactions among government institutions, street vendors, business owners, and the community. Economic factors are the primary cause of non-pedestrian activities on sidewalks. In addition, weak supervision, ineffective law enforcement, and low public awareness contribute significantly to the problem. Although the government has conducted several control and enforcement measures, these efforts have not been fully effective. Therefore, stronger supervision, increased public awareness, and policies that prioritize pedestrian rights are required.

Keywords: *Urban Politics, Sidewalk Conversion, Public Space, Pedestrians.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan perkotaan yang semakin pesat telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses. Salah satu fasilitas publik yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan adalah trotoar. Trotoar merupakan bagian dari infrastruktur perkotaan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki sebagai sarana mobilitas yang aman dan nyaman (Kartaatmadja & Mutaqin, 2022). Selain berfungsi sebagai jalur pejalan kaki, trotoar juga menjadi bagian dari ruang publik yang mencerminkan kualitas tata kelola kota dan keberpihakan pemerintah terhadap hak-hak warga dalam menggunakan ruang perkotaan (Salahudin, 2022). Keberadaan trotoar sebagai fasilitas publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 131 Ayat (1) disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain yang mendukung keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, Pasal 45 Ayat (1) menjelaskan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang wajib disediakan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Pengaturan yang lebih teknis juga terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan yang menegaskan bahwa trotoar harus digunakan sesuai fungsinya sebagai ruang bagi pejalan kaki.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, pada kenyataannya fungsi trotoar di berbagai kota di Indonesia masih sering mengalami penyimpangan. Trotoar tidak lagi digunakan sepenuhnya sebagai ruang bagi pejalan kaki, tetapi dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan lain seperti tempat berjualan, parkir kendaraan, penyimpanan barang dagangan, hingga aktivitas usaha tertentu (Hasibuan, 2023). Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya fungsi utama trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki serta menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan ruang publik perkotaan.

Fenomena alih fungsi trotoar menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemukan di kota-kota besar Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa trotoar sering mengalami penyalahgunaan fungsi akibat tingginya aktivitas ekonomi perkotaan, lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga fungsi ruang publik (Hasibuan, 2023; Sary, 2023).. Akibatnya, pejalan kaki sebagai pengguna utama trotoar harus berbagi ruang dengan berbagai aktivitas lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat.

Penelitian Hasibuan (2023) menunjukkan bahwa alih fungsi trotoar terjadi akibat lemahnya penegakan hukum serta tingginya aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perkotaan. Sementara itu, penelitian Sary (2023) menemukan bahwa penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsi berdampak pada menurunnya tingkat kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Adapun penelitian Pratama (2023) menunjukkan bahwa ruang publik perkotaan sering menjadi arena pertemuan berbagai kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut, masih diperlukan kajian yang membahas alih fungsi trotoar dari perspektif politik perkotaan, khususnya di Kota Palembang.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Palembang sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap penyediaan fasilitas publik, termasuk trotoar yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang memiliki tingkat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Peningkatan aktivitas tersebut seharusnya diimbangi dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki yang memadai. Namun, berdasarkan hasil observasi penelitian, masih ditemukan berbagai bentuk alih fungsi trotoar pada beberapa ruas jalan utama, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Pada kedua kawasan tersebut ditemukan trotoar yang digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan, tempat berjualan pedagang kaki lima, area penyimpanan barang dagangan, serta terdapat beberapa bagian trotoar yang mengalami kerusakan fisik sehingga mengurangi kenyamanan pejalan kaki.



Gambar 1.Alih fungsi trotoar sebagai kepentingan ekonomi Sumber: diolah oleh peneliti

Jalan Jenderal Sudirman merupakan salah satu koridor utama Kota Palembang yang memiliki aktivitas perdagangan dan jasa yang tinggi. Tingginya aktivitas ekonomi menyebabkan trotoar di kawasan ini sering digunakan untuk kepentingan selain pejalan kaki. Sementara itu, di Jalan Jenderal Ahmad Yani ditemukan kondisi yang berbeda, yaitu masih terdapat beberapa titik yang belum memiliki trotoar secara memadai serta adanya penggunaan ruang trotoar untuk aktivitas usaha dan parkir kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi trotoar sebagai ruang publik belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Dalam perspektif ilmu politik, permasalahan trotoar tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis tata ruang atau pembangunan infrastruktur semata. Trotoar juga dapat dipahami sebagai bagian dari ruang publik yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan relasi kekuasaan. Robert A. Dahl menjelaskan bahwa kota merupakan arena politik yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, kelompok ekonomi, dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan serta penggunaan ruang kota (Dahl, 1961). Oleh karena itu, pemanfaatan trotoar tidak terlepas dari proses negosiasi kepentingan yang terjadi di antara berbagai aktor tersebut.

Alih fungsi trotoar yang terjadi di Kota Palembang menunjukkan adanya dinamika politik perkotaan dalam pengelolaan ruang publik. Di satu sisi pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga fungsi trotoar sesuai peraturan yang berlaku, namun di sisi lain terdapat kepentingan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan trotoar sebagai sumber penghidupan. Situasi ini menciptakan hubungan yang kompleks antara kebijakan pemerintah, kepentingan ekonomi, dan hak masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Oleh karena itu, penelitian mengenai alih fungsi trotoar perlu dilakukan untuk memahami bagaimana peran politik perkotaan dalam pengelolaan trotoar serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi trotoar di Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Study participants

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, dan interaksi para aktor yang terlibat dalam pengelolaan trotoar.

Study organization

Penelitian dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Palembang. Informan penelitian terdiri atas pihak Dinas Perhubungan, Satpol PP, BBPJN, pedagang kaki lima, serta masyarakat pengguna trotoar. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap objek penelitian.

Statistical analysis

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat yang terdampak, pemerintah, pedagang dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori politik perkotaan Robert A. Dahl.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Palembang. Kedua lokasi tersebut dipilih karena merupakan kawasan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga memiliki potensi terjadinya alih fungsi trotoar. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan yang terdiri dari pihak pemerintah, pedagang kaki lima, pemilik usaha, dan masyarakat pengguna trotoar, serta dokumentasi yang mendukung hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa trotoar pada kedua ruas jalan tersebut belum sepenuhnya berfungsi sesuai peruntukannya sebagai fasilitas pejalan kaki. Pada beberapa titik ditemukan trotoar yang digunakan sebagai tempat berdagang, area parkir kendaraan, lokasi penempatan barang dagangan, serta terdapat trotoar yang mengalami kerusakan fisik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya berbagai kepentingan yang memengaruhi pemanfaatan ruang publik di kawasan perkotaan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alih fungsi trotoar di Kota Palembang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis pengelolaan ruang publik, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik perkotaan yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi, lemahnya pengawasan dan penertiban, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya alih fungsi trotoar. Temuan penelitian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikut.

A. Peran Politik Perkotaan dalam Pengelolaan Trotoar yang Di alih fungsikan di Kota Palembang

Politik perkotaan merupakan kajian yang melihat bagaimana kebijakan, kekuasaan, dan kepentingan berbagai aktor memengaruhi pengelolaan ruang kota (Salahudin, 2022). Menurut Robert A. Dahl, kota merupakan arena tempat berbagai kelompok kepentingan saling berinteraksi dan memengaruhi proses pengambilan kebijakan (Dahl, 1961). Dalam konteks penelitian ini, trotoar tidak hanya dipandang sebagai fasilitas fisik bagi pejalan kaki, tetapi juga sebagai ruang publik yang menjadi objek berbagai kepentingan. Menurut Dahl (1961), kebijakan publik di perkotaan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan ruang kota. Dalam penelitian ini, pemerintah, pedagang kaki lima, pemilik usaha, dan masyarakat merupakan aktor yang memiliki kepentingan berbeda terhadap penggunaan trotoar sehingga memunculkan dinamika dalam pengelolaan ruang publik.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi trotoar di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Ahmad Yani menunjukkan bahwa fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki belum berjalan secara optimal. Di Jalan Jenderal Sudirman, khususnya kawasan Pasar Cinde dan pertokoan sekitarnya, ditemukan trotoar yang digunakan sebagai area berdagang, tempat meletakkan barang dagangan, serta lokasi parkir kendaraan roda dua. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak pejalan kaki menjadi terbatas dan pada beberapa titik pejalan kaki harus turun ke badan jalan.

Sementara itu, di Jalan Jenderal Ahmad Yani ditemukan kondisi yang berbeda. Pada beberapa titik masih terdapat bagian jalan yang tidak memiliki trotoar secara memadai, sedangkan pada lokasi yang memiliki trotoar ditemukan penggunaan untuk kepentingan usaha dan parkir kendaraan. Selain itu, terdapat pula kondisi trotoar yang mengalami kerusakan sehingga tidak nyaman digunakan oleh masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan ruang trotoar. Pemerintah berperan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi penggunaan ruang publik. Namun dalam praktiknya, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima yang menggantungkan penghasilannya pada lokasi yang ramai pengunjung.

Dalam perspektif teori Robert A. Dahl, kondisi tersebut menggambarkan adanya interaksi antara pemerintah, pedagang kaki lima, pemilik usaha, dan masyarakat pengguna jalan. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda terhadap penggunaan trotoar. Pemerintah berusaha menjaga ketertiban dan fungsi ruang publik, pedagang kaki lima memanfaatkan trotoar untuk memperoleh

pendapatan ekonomi, sedangkan masyarakat membutuhkan trotoar yang aman dan nyaman untuk berjalan kaki.

Alih fungsi trotoar yang terjadi menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh proses negosiasi kepentingan yang berlangsung di lapangan. Dalam beberapa kasus, keberadaan pedagang kaki lima masih ditoleransi karena dianggap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Pratama, 2023). Akan tetapi, kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar sesuai fungsinya.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa politik perkotaan memiliki peran yang besar dalam pengelolaan trotoar di Kota Palembang. Pemanfaatan trotoar tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi dan sosial yang berkembang di masyarakat (Saputri, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa ruang publik merupakan arena yang mempertemukan berbagai kepentingan dan membutuhkan pengelolaan yang adil agar seluruh kelompok masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sama.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Alih Fungsi Trotoar di Kota Palembang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Ahmad Yani, ditemukan bahwa alih fungsi trotoar terjadi karena adanya berbagai faktor yang saling berkaitan. Trotoar yang seharusnya digunakan sebagai fasilitas bagi pejalan kaki pada kenyataannya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan lain seperti tempat berdagang, area parkir kendaraan, dan aktivitas usaha. Kondisi tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengawasan dan penertiban yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sarana pendukung di kawasan perkotaan. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama berkurangnya fungsi trotoar sebagai ruang publik yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya alih fungsi trotoar di Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian, banyak pedagang kaki lima memilih menggunakan trotoar sebagai lokasi usaha karena memiliki akses langsung terhadap arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Lokasi yang strategis memungkinkan pedagang memperoleh lebih banyak pelanggan dibandingkan jika berjualan di tempat yang kurang ramai.

Selain pedagang kaki lima, beberapa pemilik usaha juga memanfaatkan trotoar untuk menempatkan barang dagangan atau memperluas area usaha. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan ruang usaha yang dimiliki sehingga trotoar dianggap sebagai alternatif untuk mendukung aktivitas ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasibuan (2023) yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama pedagang memanfaatkan trotoar sebagai ruang usaha.

2. Lemahnya Pengawasan dan Penertiban

Faktor berikutnya adalah lemahnya pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan trotoar. Meskipun pemerintah melalui Satpol PP dan instansi terkait telah melakukan penertiban, namun pelaksanaannya belum berlangsung secara konsisten. Setelah dilakukan penertiban, sering kali trotoar kembali digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih bersifat sementara dan belum mampu menciptakan efek jera bagi pelanggar. Akibatnya, praktik penggunaan trotoar untuk kepentingan pribadi terus berulang dan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi trotoar. Sebagian masyarakat masih menganggap trotoar dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi tanpa memperhatikan fungsi utamanya sebagai jalur pejalan kaki. Hal tersebut terlihat dari penggunaan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan maupun lokasi berjualan.

Kurangnya pemahaman mengenai hak pejalan kaki dan pentingnya menjaga ruang publik menyebabkan pelanggaran terhadap fungsi trotoar terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga fungsi trotoar sesuai dengan peruntukannya. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Sary (2023) yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap menurunnya fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki.

4. Keterbatasan Sarana Pendukung

Pada beberapa lokasi penelitian ditemukan bahwa keterbatasan fasilitas pendukung turut berkontribusi terhadap alih fungsi trotoar. Kurangnya lahan parkir menyebabkan kendaraan diparkir di atas trotoar. Selain itu, keterbatasan ruang bagi pedagang kecil juga mendorong mereka menggunakan trotoar sebagai tempat usaha.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan trotoar tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan ketersediaan fasilitas yang disediakan pemerintah.

C. Dampak Alih Fungsi Trotoar terhadap Pejalan Kaki

Alih fungsi trotoar memberikan dampak yang signifikan terhadap kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Trotoar yang digunakan untuk aktivitas lain menyebabkan ruang gerak pejalan kaki menjadi terbatas sehingga mereka terpaksa berjalan di badan jalan yang memiliki risiko kecelakaan lebih tinggi. Selain itu, kondisi trotoar yang rusak dan dipenuhi aktivitas non-pedestrian mengurangi kenyamanan masyarakat dalam berjalan kaki. Situasi tersebut juga berdampak pada menurunnya tingkat walkability atau kemudahan berjalan kaki di kawasan perkotaan. Masyarakat menjadi lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor dibandingkan berjalan kaki karena merasa tidak aman dan tidak nyaman.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas ruang publik perkotaan dan bertentangan dengan konsep pembangunan kota berkelanjutan yang mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan trotoar yang lebih efektif agar fungsi trotoar sebagai fasilitas publik dapat kembali berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alih fungsi trotoar di Kota Palembang, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Ahmad Yani, menunjukkan adanya dinamika politik perkotaan dalam pengelolaan ruang publik. Trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitas bagi pejalan kaki pada kenyataannya masih dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan lain, seperti aktivitas perdagangan, parkir kendaraan, dan kepentingan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan trotoar tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi dan sosial yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi, lemahnya pengawasan dan penertiban, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sarana pendukung menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya alih fungsi trotoar. Dampak yang ditimbulkan antara lain berkurangnya kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki serta menurunnya fungsi trotoar sebagai ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar fungsi trotoar dapat kembali dimanfaatkan sesuai peruntukannya sebagai fasilitas bagi pejalan kaki..

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing dan dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penelitian. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Satpol PP Kota Palembang, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), para pedagang kaki lima, pemilik usaha, serta masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian politik perkotaan dan pengelolaan ruang publik di Kota Palembang.

REFERENCES

Dahl, R. A. (1961). Who governs? Democracy and power in an American city. Yale University Press.

Hasibuan, A. (2023). Penegakan hukum terhadap perlindungan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

Kartaatmadja, A., & Mutaqin, A. (2022). Peningkatan fungsi jalur trotoar pada kawasan pendidikan untuk memfasilitasi kebutuhan sarana pejalan kaki. Jurnal Tekno Global, 11(2), 45–53.
Pratama, T. P. (2023). Politik kebijakan pengembangan kawasan city walk Kota Tegal dan dampaknya terhadap pedagang kaki lima tahun 2021 (Skripsi). Universitas Jenderal Soedirman.
Salahudin. (2022). Politik perkotaan di Indonesia: Kekuasaan, ruang, dan pembangunan kota. Jakarta: Rajawali Pers.
Saputri, N. (2024). Politik perkotaan: Analisis dinamika dan problematika pembangunan infrastruktur terhadap kualitas hidup masyarakat Kota Dhaka Bangladesh tahun 2022. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 6(1), 88–102.
Sary, R. (2023). Tinjauan faktor keamanan dan kenyamanan di Sudirman Walk Palembang. Jurnal Arsir, 7(2), 120–132.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.